



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

1. **ARSANI**, tempat lahir di Mandikapau Timur tanggal 1 Juli 1978, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, beralamat di Desa Mandikapau Barat RT. 004, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/ *email* aroamara50@gmail.com, sebagai Pemohon I;
2. **SUMIATI**, tempat lahir di Mandikapau Barat tanggal 15 Agustus 1987, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Desa Mandikapau Barat RT. 004, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/ *email* aroamara50@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan permohonan penetapan izin ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri namun pernikahan Para Pemohon tersebut belum di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor: 01/SKN/MKB yang dikeluarkan Pembakal Desa Mandikapau Barat tertanggal 11 Januari 2024. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikaruniai (2) dua orang anak yang salah satunya bernama AHMAD DILLAH yang lahir di Mandikapau Barat pada tanggal 11 Januari 2008;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-13052014-0055 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 13 Mei 2014;
 3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya AHMAD DILLAH diubah menjadi AHMAD AMIN ABDILLAH dan tanggal lahir sebelumnya 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008;
 4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
 5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6303-LT-13052014-0055 nama sebelumnya Ahmad Dillah diubah menjadi Ahmad Amin Abdillah dan tanggal lahir sebelumnya 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6303-LT-13052014-0055 lahir sebelumnya 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli permohonan Para Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arsani dengan NIK 6303060107780226, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumiati dengan NIK 6303065508870001, tertanggal 20 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303061003080196 dengan nama kepala keluarga Arsani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 16 Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 01/SKN/MKB antara Arsani dan Sumiati tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-13052014-0055 tanggal 13 Mei 2014 atas nama Ahmad Dillah yang dikeluarkan Dinas

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rasad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mandikapau Barat RT. 004, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2016 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ahmad Dillah;
 - Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut yaitu untuk anak pertama Para Pemohon yang atas nama Ahmad Dillah diubah menjadi Ahmad Amin Abdillah dan tanggal lahir sebelumnya 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 April 2008;
 - Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir anaknya tersebut guna menertibkan data administrasi anak Para Pemohon;
 - Bahwa dalam proses merubah nama pada akta kelahiran anaknya tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah namanya dalam akta kelahiran anaknya tersebut, kemudian Para Pemohon mendapat penjelasan kalau untuk hal tersebut Para Pemohon harus memohon

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pada Pengadilan Negeri Martapura selaku instansi yang berwenang untuk itu;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bahriani Bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mandikapau Barat RT. 004, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2016 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ahmad Dillah;
- Bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut yaitu untuk anak pertama Para Pemohon yang atas nama Ahmad Dillah diubah menjadi Ahmad Amin Abdillah dan tanggal lahir sebelumnya 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 April 2008;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir anaknya tersebut guna menertibkan data administrasi anak Para Pemohon;
- Bahwa dalam proses merubah nama pada akta kelahiran anaknya tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk merubah namanya dalam akta kelahiran anaknya tersebut, kemudian Para Pemohon mendapat penjelasan kalau untuk hal tersebut Para Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Martapura selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Muhammad Rasad dan saksi Bahriani Bin Muhammad yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berkaitan dengan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Arsani dan bukti P-2 berupa KTP atas nama Sumiati dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Mandikapau Barat RT. 004, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arsani, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati dihubungkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Menikah Nomor 01/SKN/MKB diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon I atas nama Arsani dengan Pemohon II atas nama Sumiati merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-13052014-0055 tanggal 13 Mei 2014, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa anak kesatu laki-laki dari Ibu Sumiati memiliki nama Ahmad Dillah yang lahir tanggal 11 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa adapun akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama tersebut yaitu untuk anak pertama Para Pemohon yang atas nama Ahmad Dillah diubah menjadi Ahmad Amin Abdillah dan tanggal lahir sebelumnya 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 April 2008. Para Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir anaknya tersebut guna menertibkan data administrasi anak Para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon semula

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dillah menjadi Ahmad Amin Abdillah dan tanggal lahir semula 11 Januari 2008 diubah menjadi 21 April 2008 guna menertibkan data administrasi kependudukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Para Pemohon dan tidak ada tujuan dari Para Pemohon untuk mengaburkan identitas diri anaknya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar maupun marga keluarga;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Para Pemohon serta kepastian hukum identitas anak Para Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen maupun dokumen kependudukan anak Para Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum kedua Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga petitum angka ketiga permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Para Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon semula Ahmad Dillah lahir tanggal 11 Januari 2008 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-13052014-0055 tanggal 13 Mei 2014 diubah dan menjadi nama Ahmad Amin Abdillah lahir tanggal 21 April 2008;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Luthfi Shabana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Luthfi Shabana, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp -
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
- PNPB Panggilan	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)